



# Strategi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Perspektif Ketahanan Wilayah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Local Government Strategy to Realize Multiculturalism Values in  
the Perspective of Regional Resistance  
(Case Study in the Special Region of Yogyakarta)

Purnomo Herlambang  
Akademi Angkatan Udara

[purnomoharlambang1975@gmail.com](mailto:purnomoharlambang1975@gmail.com)

*Abstract – The values of multiculturalism in Indonesia were born along with the awareness of the nation's children to expel the invaders from this archipelago with the spirit of togetherness, sharing the same fate, and the desire to leave regional traits that have been proven unable to expel the invaders from this motherland. It is from this spirit of togetherness rooted in diversity that brings the Indonesian people to gates of Indonesian. Independence, United, sovereign, just and prosperous. The spirit of multiculturalism values that are still being guided by all Indonesian people are the value of mutual respect, the value of mutual tolerance, the value of unity, the value of cooperation, and the value of solidarity that must be nurtured and maintained. The Special Region of Yogyakarta is part of the unity state of the Republic of Indonesia, which has an attraction for the Indonesian people themselves and the world community to visit and get to know Yogyakarta up close. The city which is attached to the nickname as a city of culture, tourism city. And student city is supported by a culture of inhabitants who are always grateful and accept the nature that has been given by the Almighty, to the low cost of living. Yogyakarta has its own magnet as must-visit area in Indonesia. The presence of foreign culture in Yogyakarta that is able to blend in with local culture and grow and develop in the surrounding community, so it is not an exaggeration if Sri Sultan Hamengkubuwono X (Governor of DIY), said that "Yogyakarta is a miniature of Indonesia". The negative side of the presence of foreign culture to Yogyakarta is the inability of local culture to blend in with the culture of immigrants, which is precisely the diversity or plurality in Yogyakarta that can lead to conflict that lead to social unrest. Migrant communities who still bring the original culture of the region to Yogyakarta which may not necessarily be accepted by culture of the people of Yogyakarta. There needs to be strategy from the Yogyakarta Regional Government in order to realize the values contained in Multiculturalism in the perspective of region resilience in Yogyakarta.*

Keywords : Strategy, Multiculturalism Values, Regional Resilience Perspective.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Kepulauan (*Archipelago State*) terbesar didunia yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil dengan wilayah daratan seluas 1,937 juta km<sup>2</sup> dan memiliki garis pantai terpanjang didunia. Sebagai negara besar, Indonesia juga memiliki 1.340 suku bangsa diantaranya Suku Jawa yang merupakan kelompok suku terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 41 % dari total populasi penduduk Indonesia dan diikuti suku Sunda, Madura, Minangkabau dan Bugis. Dengan suku bangsa yang begitu banyak di Indonesia, bukan tanpa

alasan jika bisa dikatakan bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang sudah sangat lekat tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakatnya. Perbedaan bukan merupakan suatu penghalang bagi masyarakat Indonesia, hal ini terbukti pada era penjajahan dimana perbedaan yang ada justru menghadirkan persatuan untuk menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kini, setelah bangsa ini merdeka, semangat akan nilai-nilai multikulturalisme terus dipedomani oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimana nilai-nilai tersebut seperti nilai tolesansi, nilai persatuan, nilai saling menghargai, nilai saling menghormati, dan nilai solidaritas yang harus terus ditanamkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa guna mencapai cita-cita bersama menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Setiap etnis memiliki budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, musik, tari, makanan, serta busana yang berbeda-beda. Demikian juga dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing etnik berbeda-beda diantaranya menganut agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, dimana kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya telah diatur berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, dengan berbagai perbedaan yang ada pada negeri ini, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara majemuk atau multi-etnik atau multikultur. Sukarno berpendapat, bahwa pluralisme yang ada di Indonesia merupakan keberagaman yang tidak dibatasi oleh perbedaan suku, bahasa, agama, bahasa maupun status sosial dari masyarakat yang tinggal didalamnya. Lebih lanjut Sukarno menjelaskan bahwa pluralisme menuntut adanya kemauan untuk menerima perbedaan diantara perbedaan. Pluralisme menuntut kemampuan untuk menerima perbedaan. Konsep pluralisme adalah kemampuan kapasitas psikologis untuk hidup dengan orang atau kelompok yang berbeda suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan etnis. Multikulturalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keniscayaan dan keharusan karena pada hakikatnya telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bersifat pluralistik dari sisi ras, etnis, bahasa, status sosial, dan kepercayaan. Berdasarkan situs resmi Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terbentuknya multikulturalisme diantaranya adalah :

#### 1.1.1 Faktor sejarah (*historis*).

Bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Hal ini menjadi daya tarik negara lain seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia yang tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan beberapa diantaranya menikah dengan penduduk setempat, kondisi inilah yang menyebabkan keragaman budaya dan ras yang ada di nusantara semakin bertambah.

#### 1.1.2 Pengaruh keterbukaan terhadap kebudayaan asing.

Keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya budaya asing, juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya masyarakat majemuk. Masyarakat yang lebih maju akan lebih cepat menerima adanya perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang tradisional. Dengan hadirnya budaya asing ke Indonesia, menyebabkan masyarakat memiliki budaya yang beragam.

#### 1.1.3 Faktor geografis.

Letak geografis bangsa Indonesia yang sangat strategis diantara dua benua dan dua samudra membawa keberuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia terutama sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini tentu banyak dimanfaatkan oleh pedagang asing datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, diantaranya China, India, Arab dan beberapa negara eropa seperti Belanda dan Portugis. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap terbentuknya multikulturalisme di Indonesia, seperti kebudayaan dan agama.

#### 1.1.4 Faktor fisik dan geologi.

Letak Indonesia yang berada di tiga lempeng yang berbeda yaitu lempeng Asia, lempeng Australia dan lempeng Pasifik, secara geologi menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan. Kondisi fisik antara satu pulau dengan pulau yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya juga berbeda-beda pula.

1.1.5 Faktor iklim. Faktor iklim juga berpengaruh terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Secara geologi dapat dilihat bahwa antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh daerah yang berada di pegunungan tentu akan berbeda sifat dan karakter dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Demikian juga kehidupan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan dan masyarakat yang masih tinggal di daerah pedalaman, tentu akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Dari perbedaan yang ada tersebut akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya multikulturalisme.

Pada dasarnya semua bangsa di dunia memiliki sifat multikultural. Masyarakat yang multikultural memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut, diantaranya dengan keberagaman ras, etnis, suku ataupun agama menjadikan bangsa tersebut memiliki kekhasan tersendiri. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam dan kultural yang berarti tentang budaya, sehingga multikulturalisme identik dengan memaknai perbedaan. Menurut May, multikulturalisme adalah suatu pendekatan yang menggantikan universalisme dan yang memperkenalkan etnik yang tidak perlu dan tidak mendukung ke dalam wilayah perhatian atau kegiatan 'masyarakat sipil'. (May, 1999). Steinberg menguraikan bahwa multikulturalisme adalah suatu posisi multikultural untuk menjawab perbedaan yang berkaitan dengan rasial, golongan sosial-ekonomi, jender, bahasa, budaya, jenis kelamin, dan ketunaan. (Steinberg, 2009: 217). Calhoun, Light, & Keller mendefinisikan bahwa multikulturalisme adalah suatu pendekatan untuk kehidupan dalam suatu masyarakat pluralistic, yang menuntut untuk menemukan cara-cara bagi orang-orang untuk memahami dan berhubungan dengan yang lainnya yang tidak tergantung kepada persamaan mereka, tetapi lebih pada penghargaan dari perbedaan mereka. (Craig, C, 2012) menambahkan bahwa multikulturalisme lebih dari pada suatu resep obat bagi hubungan antar group yang lebih baik di Amerika Serikat. Hal itu juga dikenal sifat multikultural yang meningkat dari hubungan social dalam dunia yang lebih terpadu secara internasional dan global. (Craig; 2012: 137).

Bangsa Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang memiliki keunikan dan kerumitan tersendiri karena berdasarkan kemajemukan suku bangsa, agama, bangsa maupun ras pada kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang tumbuh di negara Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika, yang berlandaskan pada corak atau struktur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk baik ditingkat nasional maupun lokal. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial (*social power*) dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama, hidup harmonis dan stabil untuk membangun bangsa sebagaimana telah ditunjukkan para *Founding Father* bangsa ini yang mampu memerdekakan negara ini di atas perbedaan yang ada. Ketika berbicara mengenai kemajemukan, maka yang tergambar adalah sebuah konsep keragaman yang lebih dari satu, yang berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Kemajemukan ini, dilihat dan dirasakan dengan multi agama yang diakui oleh pemerintah, suku bangsa, budaya, kebiasaan/tradisi dan kedaerahan.

Di dalam kemajemukan yang menekankan pada kekuatan primordialisme, mungkin saja berpotensi terhadap terjadinya konflik apabila tidak dikelola dan dibina dengan benar. Kemajemukan justru akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap kelompok yang etnosentrisme merupakan sikap emosional sekelompok golongan, etnik atau agama yang merasa etniknya lebih superior atau lebih hebat dari etnik lain yang ada di Indonesia. Berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah menguras energi dan merugikan tidak hanya jiwa dan materi saja, akan tetapi juga mengorbankan keharmonisan dalam sendi masyarakat Indonesia. Menurut Nadilla (2020) Konflik bisa saja terjadi karena perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Beberapa konflik yang pernah menjadi catatan hitam sejarah Indonesia karena disebabkan perbedaan pandangan, diantaranya :

- a. Tragedi Sampit pada tahun 2001. Tahun 2001 adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia terutama di daerah Sampit. Tragedi Sampit adalah kerusuhan yang amat mengerikan yang melibatkan dua suku bangsa di Indonesia, adalah suku Dayak dan suku Madura. Tercatat 500 orang tewas dan 100 orang di antaranya mengalami pemenggalan kepala.
- b. Konflik antar agama di Ambon tahun 1999. Konflik yang terjadi di Maluku sering dibilang sebagai konflik antara umat Islam dan Kristen, walaupun pada kenyataannya latar belakang konflik ini lebih kompleks. Konflik ini tercatat dalam lembaran hitam sejarah Indonesia, dimana terjadi pembantaian Tobelo dan serangan dan pembakaran terhadap Gereja Protestan Silo, yang merupakan salah satu Gereja terbesar di Maluku pada tanggal 26 Desember 1999. Sementara itu, pada hari yang sama sebanyak 800 orang umat Muslim di Masjid desa Tobelo terbunuh oleh umat Kristen, akibat dari serangan ini membuat kedua umat tersebut terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan, hingga aparat keamanan setempat pun tidak mampu untuk menanganinya.
- c. Konflik antar etnis pada tahun 1998. Konflik ini diawali oleh krisis moneter yang mengakibatkan sendi-sendi negara lumpuh dan meluas sehingga berubah menjadi konflik antar etnis Pribumi dan etnis Tionghoa, konflik ini mengakibatkan banyak aset-aset Tionghoa dijarah dan dibakar. Selain itu, juga banyak laporan yang menyatakan telah terjadi pelecehan seksual dan pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik antar etnis ini benar-benar menjadikan Indonesia seperti lautan darah.
- d. Konflik Vertikal antar golongan dan pemerintah (GAM, RMS dan OPM). Konflik antar golongan memang sering terjadi di Indonesia, namun yang paling parah adalah perlawanan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) terhadap pemerintah yang akhirnya dibawa ke dunia Internasional. Konflik ini terjadi didasari atas keinginan memerdekakan diri dari negara Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mengedepankan dialog, sehingga operasi militer pun akhirnya diberlakukan oleh pemerintah selama bertahun-tahun dan telah melukai masyarakat D.I. Aceh serta memakan korban jiwa dari masyarakat Sipil. Konflik ini akhirnya mereda setelah terjadi kesepakatan, yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.

Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki masyarakat beragam atau multikultur dimana kota ini menjadi salah satu pusat destinasi kebudayaan di Indonesia yang mempunyai beragam potensi budaya diantaranya budaya yang bersifat *tangible* dan *Intangible*.

*Tangible* adalah produk budaya yang berwujud nyata seperti bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, masjid, kelenteng, candi, pura, maupun benda - benda prasejarah (*stone ball*, kapak perimbas, arca, beliung, kapak lonjong). Sedangkan *Intangible* adalah produk budaya yang tidak berwujud namun dapat dinikmati karyanya oleh masyarakat luas berupa kepandaian dan tradisi contohnya adalah : seni tari, upacara tradisi, dan bahasa daerah. Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Sebutan “Kota Budaya” sekaligus sebagai kota “Jangkar Budaya Jawa” menjadi predikat yang begitu melekat pada wajah kota Yogyakarta. Produk tradisional dan kebudayaan tradisional begitu dijunjung tinggi sebagai seni budaya adiluhung, yang oleh masyarakat sekitar kesejarahan Jawa diuri-uri atau dilestarikan untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi budaya nasional. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memegang peranan penting sebagai simbol atau lambang pusat dan sumber kebudayaan yang dimiliki oleh D.I. Yogyakarta, sehingga Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi.

D.I. Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Provinsi ini memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> yang terdiri atas empat kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km<sup>2</sup>. Sejak abad ke-18, penduduk D.I. Yogyakarta bersifat majemuk dimana selain orang Jawa yang merupakan penduduk asli pribumi, juga terdapat orang Cina, Arab, Bugis, dan Eropa. Suku bangsa yang mendiami provinsi D.I. Yogyakarta terdapat pada table 1, sebagai berikut :

Tabel 1 Suku bangsa yang mendiami provinsi DIY Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010

Nomor	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi
1	Jawa	3.331.355	96,53%
2	Sunda	23.752	0,69%
3	Melayu	15.430	0,45%
4	Tionghoa	11.545	0,33%
5	Batak	9.858	0,29%
6	Madura	5.489	0,16%
7	Minangkabau	5.152	0,15%
8	NTT	4.238	0,12%
9	Manado	3.790	0,11%
10	Bali	3.497	0,10%
11	Lombok	3.135	0,09%
12	Banjar	2.745	0,08%

Nomor	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi
13	Bugis	2.461	0,07%
14	Arab	1.564	0,05%
15	Makassar	1.251	0,04%
	Lain-lain	25.746	0,74%

Selain dikenal sebagai tempat wisata, D.I. Yogyakarta juga disebut dengan kota Pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan sangat pesat di D.I. Yogyakarta, hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya universitas maupun sekolah tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang telah menjadi magnet tersendiri hadirnya penduduk dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk menimba ilmu, bekerja, dan bermukim, hingga tidak berlebihan apabila Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan “Yogyakarta sebagai miniaturnya Indonesia”. Menurut Koentjaraningrat (1980:367), bahwa kemajemukan etnis dapat menghasilkan konflik apabila keberagaman tidak di topang dengan sikap yang bijaksana dari setiap individu. Sehingga yang muncul kemudian adalah prasangka sosial yang hanya menghasilkan disintegrasi sosial

## 1.2 Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka pada penelitian ini dibatasi pada masalah :

1.2.1 Berbagai peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah itu menunjukkan ada penurunan kondisi dimana Yogyakarta yang sebelumnya dikenal sebagai *City of Tolerance* telah berubah menjadi daerah darurat intoleransi. Hasil penelitian LSM yang fokus mengadvokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia Setara Institut (2019), menyimpulkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tertinggi di Indonesia.

1.2.2 Faktor negara dapat diidentifikasi berdasarkan dua sisi, regulasi dan institusi. Regulasi itu pada akhirnya dapat menjadi panduan untuk pemerintah lokal dalam mengatasi atau malah memperparah intoleransi.

1.2.3 Kritik keras juga dilontarkan oleh KH Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman, Yogyakarta, dan merupakan salah satu tokoh yang mengusung nilai-nilai toleransi antarumat beragama dan menginisiasi *Jogja City of Tolerance*, mengkritik ketidakmampuan pemerintah dan lambannya aparat penegak hukum dalam menangani berbagai tindakan intoleran dan kekerasan di Yogyakarta. Lebih lanjut KH Abdul Muhaimin juga menilai munculnya kelompok intoleran atau pelaku tindak kekerasan telah mendegradasi semangat toleransi yang telah menjadi ruh, spirit, substansi dan tujuan agama, yakni untuk menebarkan cinta-kasih, persaudaraan global, rasa aman, kenyamanan, serta rahmat bagi alam semesta di Yogyakarta. <https://www.nusantarainstitute.com/yogyakarta-riwayatmu-kini/> (diakses tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.13 WIB).

1.2.4 Merebaknya aksi-aksi intoleransi, kontra kemajemukan, dan bahkan kekerasan antarumat beragama. Yang paling mutakhir adalah aksi penyerangan terhadap seorang pastor yang sedang memimpin ibadah di Gereja St. Lidwina, Sleman.

1.2.5 Ketidaktegasan aparat dan penegak hukum dalam menindak para aktor dan pelaku tindakan intoleransi dan kekerasan di masyarakat. Jika ada kesan meremehkan atau membiarkan

para pelaku tindakan intoleransi dan kekerasan, maka mereka berpotensi melakukan hal serupa di kemudian hari.

1.2.6 Sebuah nisan berbentuk salib yang terpasang pada makam Albertus Slamet Sugihardi (60 tahun) dikabarkan dipotong warga Purbayan, Kotagede Yogyakarta. Menurut berita Solopos Yogyakarta (18 Desember 2018) Insiden tersebut terjadi pada Senin 17 Desember 2018.



Gambar 1. Pemotongan Nisan Salib di Pemakaman Umum Kotagede Yogyakarta

1.2.7 Konflik Sosial Mahasiswa Papua di Babarsari.

Kerusuhan terjadi di Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 05.00 WIB pagi hari. Kerusuhan itu mengakibatkan salah satu *outlet* yang merupakan sebuah *kafe* dan enam unit sepeda motor terbakar. Berdasarkan informasi dari Tempo.co, aksi perusakan terjadi merupakan buntut dari keributan yang terjadi disalah satu tempat hiburan karaoke di kawasan tersebut.



Gambar 1.2 Konflik Sosial Mahasiswa Papua di Babarsari Yogyakarta

## II. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori – teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga menggunakan jurnal – jurnal penelitian nasional dan internasional sebagai bahan acuan, diantaranya:

### 2.1.1 Kajian Tentang Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan ag = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi adalah cara atau upaya atau rencana jangka panjang, yang terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* (dalam *Harvard Business Review* 1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Sedangkan menurut Fandi Tjiptono, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

### **2.1.2 Kajian Tentang Pemerintahan Daerah.**

Menurut Syafiie (2011;5) Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwah pemerintahan itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas). Sementara Surya Ningrat (1992) mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan pada daerah otonom. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa, Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **2.1.3 Kajian Tentang Multikulturalisme**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah kebudayaan yang apabila dijelaskan secara etimologi, berasal dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain. Untuk menerima perbedaan yang ada maka dibutuhkan toleransi demi terbentuk sikap saling memahami, menghormati, dan menerima keberadaan budaya lain. Jika tidak ada toleransi, maka konflik akibat ketidak saling pengertian dan pemahaman terhadap realitas multikultural tersebut akan mudah sekali muncul. Menurut Choirul Mahfud (2006) multikulturalisme adalah sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, suku, etnik, agama, dan lain sebagainya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa setiap bangsa yang plural dan

majemuk itu adalah bangsa yang memiliki budaya yang beragam. Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pada kata-kata diatas terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik dan beragam. Hal ini menggambarkan adanya pengakuan dari setiap individu yang merasa dihargai sekaligus perwujudan rasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dilingkungannya.

Sementara Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (2007;13), mengatakan bahwa multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan realitas multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang mengakui eksistensi kultural yang ada, terlepas dari besar atau kecilnya; pandangan inilah yang kemudian disebut sebagai *politics of recognition*. Sementara Menurut Lawrence Blum (dalam Rivai, 2014), multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Suparlan menyebutkan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sementara menurut M. Atho' Muzhar (dalam Rivai, 2014), multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, tetapi mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut”.

### 2.1.5 Kajian Tentang Nilai

Menurut kamus Webster mengatakan bahwa “*A value, says is a participle, standard quality regarde as worth or desirable*”, dimana nilai merupakan prinsip, standar, atau kualitas yang dipandang bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai sendiri adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Sedangkan Wahana memberikan penjelasan tentang nilai sebagai suatu sifat atau kualitas yang membuat sesuatu berharga, layak diingini atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dan dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya, merupakan pemandu dan pengarah hidup sebagai manusia.

Sementara Mardiatmadja dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Nilai dan Kebajikan* (1986) menjelaskan bahwa nilai menunjuk pada sikap orang terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai yang dimaksud akan saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem dimana satu dan yang lainnya saling berhubungan dan berpengaruh terhadap segi kehidupan manusia. Steeman (dalam Adisusilo, 2013:56) menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi, dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai lebih dari sekedar keyakinan, pola pikir dan tindakan yang berhubungan erat dengan etika. Rokeach (1998, dalam Djemari, 2008: 106) mendefinisi nilai merupakan suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek. Sementara Linda dan Richard Eyre (1997, dalam Adisusilo, 2013:57) menjelaskan tentang nilai adalah standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa seseorang, bagaimana hidup seseorang, dan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Definisi lain mengenai nilai diutarakan oleh Tyler (1973:7, dalam

Djemari, 2008: 106), yaitu suatu objek, aktivitas atau ide yang dinyatakan oleh individu guna mengendalikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan.

### 2.1.6 Kajian Tentang Ketahanan Wilayah

Berdasarkan situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an, namun definisi mengenai ketahanan nasional baru dirilis pada 1968. Setelah mengalami beberap kali revisi pada beberapa bagiannya, akhirnya definisi ketahanan nasional terus digunakan hingga saat ini. Purwo Adi dalam jurnal *Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI* (2016) mengatakan bahwa ketahanan nasional memiliki tiga fungsi utama, yakni:

**a. Sebagai daya tangkal konsepsi penangkalan.**

Artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan terhadap integritas, identitas serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

**b. Ketahanan nasional sebagai pengarah.**

Artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki Bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan serta keamanan, untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

**c. Pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner.**

Hal ini bisa dicapai Bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur.

Ketahanan wilayah adalah definisi yang diturunkan dari konsep ketahanan nasional yang berisi kondisi dinamik suatu wilayah yang terdiri dari beberapa aspek kehidupan yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan baik dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini ketahanan wilayah bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan/ketangguhan wilayah dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sebagai tolak ukur dari keberhasilan ketahanan nasional.

## 2.2 Hasil Peneliti Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan riset atau penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi, mengetahui bentuk penelitian yang dilakukan, memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan serta sebagai pembandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memacu peneliti untuk melakukan penelitian dan memperoleh solusi yang baru dan original. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kajian penelitian yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini antara lain:

2.2.1 Muhammad Hendri Nuryadi, Universitas Negeri Surakarta/UNS (Disertasi 2018), yang berjudul “**Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kota Surakarta)**” ini, peneliti meneliti tentang Pendidikan Multikulturalisme dan mengambil data dari beberapa kasus di Perguruan Tinggi di Kota Surakarta seperti Universitas Negeri Surakarta (UNS), dan Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI). Kesamaan penelitian ini adalah penguatan terhadap paham multikultural dalam mendukung ketahanan nasional melalui bidang pendidikan.

2.2.2 Zen Marchel Orlando Siboro, FISIP Universitas Sumatera Utara (Skripsi 2014) yang berjudul “**Politik Multikulturalisme Di Samosir**”. Penelitian ini fokus menjelaskan tentang kondisi Politik Multikulturalisme dan peran serta masyarakat Multikulturalisme yang terjadi di Kabupaten Samosir periode 2009-2014. Persamaan penelitian ini adalah bagaimana peran serta dari masyarakat yang multikulturalisme di Pulau Samosir, terhadap regulasi yang dihasilkan oleh Legislatif dan Eksekutif pasca Pemilu 2009-2014. Bagaimana pengaruh kebijakan dari pemerintah daerah dalam kehidupan masyarakat yang multikultur di Pulau Samosir. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah, bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata dan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada kedua hal tersebut, perekonomian masyarakat Yogyakarta dapat tumbuh dan berkembang didukung dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah setempat dalam menggerakkan roda perekonomian di Yogyakarta. Ketika Yogyakarta telah mampu memberikan daya tarik tersendiri kepada seluruh masyarakat di Indonesia, maka perlu adanya strategi dari legislatif maupun eksekutif setempat untuk menjaga keberagaman Yogyakarta agar tetap aman dan nyaman bagi penduduk lokal maupun pendatang di Yogyakarta.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Keberagaman masyarakat Yogyakarta merupakan anugerah yang harus disyukuri. Ketika diibaratkan sebagai sebuah Pelangi, maka masyarakat yang tinggal di Yogyakarta sangat indah dipandang karena memiliki warna khas dan terdiri dari lebih satu warna. Masyarakat yang mampu menyatukan kebersamaan diantara perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga menghasilkan kebersamaan, toleransi, serta sikap saling menghargai antara masyarakat ditengah perbedaan yang ada. Namun, hal tersebut tidak akan terlihat indah jika kehidupan masyarakatnya tidak dikelola dengan baik. Perselisihan dan konflik yang disebabkan karena perbedaan, justru akan menghasilkan budaya yang anarkis dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tentu diperlukan upaya meminimalisir terjadinya konflik akibat perbedaan tersebut melalui penanaman nilai-nilai keberagaman. Keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat (etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, ras) perlu diatur dan dikelola dengan strategi dari pemerintah setempat, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam mendukung Ketahanan Wilayah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif walaupun secara keilmuan juga akan menekankan pada penelitian yang berupa studi kasus. Pendekatan secara deskriptif dimaksudkan adalah pendekatan yang mengacu kepada prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 2007: 67).

Menurut Gray (dalam Consuelo, 1993: 71) mendefinisikan metode penelitian deskriptif adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Sementara Bogdan dan Tolyor (dalam Moleong, 1998: 3) mendefinisikan Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang berdasarkan pada perilaku yang diamati.

#### **b. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan pemerintahan Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, karena kota merupakan salah satu kota pelajar, kota wisata dan kota budaya yang menjadi tujuan dari seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, muncul keinginan dari peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan lengkap untuk mendapatkan data dan analisis secara mendalam dan komprehensif tentang Strategi dari pemerintah daerah setempat guna mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam mendukung Ketahanan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **c. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini mengarah pada sampel *puspusive*, yakni sampel yang mengutamakan tujuan penelitian daripada populasi dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2001: 118; Moleng, 2004: 224). Subyek ini meliputi :

- a. *Stakeholder* yang terkait dari pemerintah daerah setempat.
- b. Aparat keamanan yang menjadi bagian dari pelaksana dilapangan.
- c. Lembaga-lembaga Sosil Masyarakat, serta.
- d. Masyarakat sebagai pengguna kebijakan pemerintah daerah.

Objek penelitian ini adalah semua proses yang berkaitan dengan Strategi dari pemerintah daerah setempat guna mewujudkan nilai-nilai multikulturalisme dalam perspektif Ketahanan Wilayah. Adapun data primer yang diambil dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informasi yang berupa ucapan atau kata-kata yang diperoleh langsung ketika wawancara.
- b. Peristiwa dan situasi yang berhubungan dengan kegiatan subjek penelitian yang melibatkan orang lain.
- c. Sikap-sikap yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung pada subjek penelitian.
- d. Perbuatan dan tindakan, yang diperoleh sama seperti nomor 3 di atas yang merupakan aksi nyata lanjutan dari sikap yang telah diambil sebelumnya.

Sedangkan sumber data sekunder di dapat dari hasil studi dokumen-dokumen hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik berupa foto, vidio, laporan kegiatan, jurnal, maupun tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak maupun elektronik.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, wawancara, kajian pustaka, dengan penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Kuesioner.**

Menurut Sutopo (2002:70) yang dimaksud dengan kuesioner adalah suatu proses pengambilan data dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah penelitian, sedangkan Sutopo (2002: 70) menjelaskan mengenai pengertian kuesioner adalah “merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian”. Sedangkan Mardalis (2008:66) menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini, Teknik kuesioner adalah menggunakan angket, dimana daftar pertanyaannya dibuat secara terstruktur dan digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.

## 2. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46), “observasi merupakan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”, sedangkan Sugiyono (2014:145) mengatakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Demikian pula dengan Riyanto (2010:96) berpendapat bahwa “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi berperan aktif yaitu: mengadakan pengamatan, mendengarkan, mencari informasi secara langsung, interaksi sosial, dan lain-lain (Moleong, 2001: 125) yaitu melakukan interaksi kepada pemangku kebijakan, interaksi dengan aparat keamanan yang ada dilapangan, serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat serta pemuka agama yang ada didaerah Yogyakarta tentang kehidupan masyarakat multikultural dalam mendukung Ketahanan Wilayah.

## 3. Interview/ wawancara.

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap sebagai pihak yang mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (1998;135) bahwa wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu”. Untuk mendapatkan data dibutuhkan pada metode wawancara ini, maka wawancara dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 (dua) bentuk, diantaranya :

- a). Wawancara bersifat mendalam (*In-depth interview*). Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan sebuah panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan dilakukan kepada responden kunci (*key informan*). Diharapkan hasil dari wawancara dengan responden kunci ini akan menghasilkan data yang valid mengenai Strategi Pemerintah Daerah guna mewujudkan nilai-nilai Multikultural dalam mendukung Ketahanan Wilayah.
- b). Wawancara biasa atau bebas. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan terhadap kelompok responden pangkal dan responden biasa. Penggolongan responden pangkal adalah aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, sedangkan responden biasa seperti penduduk sekitar lingkungan lokasi dilaksanakan penelitian ini.

## 4. Metode Dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, dimana dokumentasi yang

dilakukan adalah mengumpulkan beberapa literasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Arikunto (2002:158), Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

**e. Teknik Pengolahan Data**

Berdasarkan Creswell (2010: 285) mengutip pendapat Gib (2007), menjelaskan bahwa “validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti, konsistensi jika diterapkan oleh peneliti lain (dan) untuk penelitian berbeda”. Sedangkan Lincoln & Guba dalam (Emzir, 2011: 79) mengusulkan terdapat empat kriteria atau empat standar keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu berdasarkan standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Keempat standar/ kriteria ini, ditunjukkan dalam tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Standar Keabsahan Data Penelitian

Aspek	Kriteria Penelitian kuantitatif (Saintifik)	Kriteria Penelitian Kualitatif (Naturalistik)
Nilai Kebenaran	Validitas Internal ( <i>internal validity</i> )	Kredibilitas ( <i>Credibility</i> )
Penerapan	Validitas Eksternal	Transferabilitas ( <i>transferability</i> )
Konsistensi	Reliabilitas ( <i>reliability</i> )	Dependabilitas ( <i>dependability</i> )
Kenetralan	Objektivitas ( <i>objectivity</i> )	Konfirmabilitas ( <i>confirmability</i> )

Sumber: Emzir (2011: 79); A Chaedar Alwaisilah (2011: 124)

Menurut Moleong (2004: 175) kriteria dan pemeriksaan data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Ikhtisar Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

No	Kriteria	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1	Kredibilitas	(1) Perpanjangan Keikutsertaan (2) Ketekunan Pengamatan (3) Triangulasi (4) Pengecekan Sejawat (5) Kecukupan Referensial (6) Kajian Kasus Negatif (7) Pengecekan Anggota
2	Keteralihan	(8) Uraian Rinci
3	Kebergantungan	(9) Audit Kebergantungan
4	Kepastian	Audit Kepastian

Dalam penelitian ini, Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan validitas data: kredibilitas data, kebergantungan data, dan kepastian data.

**i. Kredibilitas**

Bogdan dan Biklen (1998: 104) berpendapat bahwa “untuk memperoleh keabsahan dari suatu penelitian, maka data yang digunakan metode *triangulasi* , dimana untuk menetapkan suatu faktor dengan memerlukan lebih dari satu sumber informasi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Moleong (2004: 178) dimana *triangulasi* yang digunakan adalah *triangulasi* berdasarkan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda”.

ii. Kebergantungan (*dependabilitas*)

Moleong (2007) berpendapat bahwa “untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan dalam pelaporan penelitian, peneliti melakukan uji keabsahan (*dependabilitas*) pada proses penelitian”. Peneliti melaksanakan metode *dependabilitas* atau kebergantungan dengan selalu berkonsultasi kepada dosen pembimbing dari awal hingga pada penulisan.

iii. Kepastian (*konfirmabilitas*)

Untuk memperoleh hasil (*product*) dari sebuah penelitian, maka perlu adanya kepastian keterkaitan antara data, informasi dan interpretasi yang dituangkan dalam organisasi pelaporan yang didukung oleh materi-materi yang tersedia dengan cara setelah data terkumpul, penulis memaparkan kepada setiap informan disertakan bukti-bukti yang tersedia dan informan akan membubuhkan tanda tangan apabila audit yang dilaksanakan sudah sesuai dengan data yang diperoleh (reduksi data). Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis melainkan bagian dari proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini berlangsung secara berlanjut terutama selama penelitian dan pengumpulan data secara kualitatif berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dapat disederhanakan dengan berbagai cara, diantaranya: melalui seleksi ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan dalam pola yang lebih luas.

#### f. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dan hasil pengamatan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian setiap informasi yang baru diperoleh akan disinkronisasi kepada informasi yang terkumpul dan kemudian hasilnya digunakan untuk membangun pertanyaan berikutnya. Metode yang digunakan di atas biasa dikenal dengan metode *on-going analysis*. Semua data yang digunakan kemudian di klasifikasi terlebih dahulu dengan tema yang diambil, dengan sumber informasi dan dengan tujuan penelitian.

## IV. PEMBAHASAN

### 1. Apakah pola hidup keberagaman dalam kerangka masyarakat multikultural sudah membudaya dalam kehidupan keseharian masyarakat Yogyakarta?

Keberagaman masyarakat Yogyakarta sudah ada semenjak dahulu, dan selalu diturunkan kepada generasi penerusnya. Sikap toleransi, gotong royong, menjunjung tinggi adanya perbedaan, serta sikap saling hormat menghormati, sudah sejak lama tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Yogyakarta. Tantangan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, menjadikan keadaan kebudayaan Yogyakarta menjadi tidak menentu, hal ini disebabkan diantaranya adalah adanya isu internasional tentang globalisasi. Hadirnya Globalisasi telah menghilangkan batas negara dalam menjalankan pertukaran sukarela lintas batas dan produk global yang semakin terintegrasi. Hadirnya globalisasi telah membawa homogenitas diseluruh antero dunia, hal ini mengakibatkan percampuran budaya lokal dengan budaya dunia tidak dapat dielakkan. Yogyakarta sebagai salah satu pusat peradaban studi dunia,

telah menghadirkan globalisasi yang begitu cepat ditengah kehidupan masyarakatnya yang majemuk. Hal ini ditunjang juga dengan keterbukaan masyarakat Yogyakarta yang selalu menerima masuknya budaya-budaya asing di daerahnya, hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya akulturasi budaya.

Dengan kemunculan dari kelompok-kelompok identitas yang semakin menguat, maka globalisasi akan mendorong terjadinya penguatan kesadaran politik dalam kelompok-kelompok ini sehingga membuka kesadaran bagi setiap individu untuk mendorong akan pentingnya sebuah identitas. Beberapa permasalahan kemudian muncul ditengah multikulturalisme masyarakat Yogyakarta, diantaranya :

a. Masalah Etnisitas

Relasi sosial antaretnis terjalin berdasarkan status sosial, warna kulit, dan agama, dimana setiap etnis menganggap budaya, kelompoknya, atau pilihannya adalah yang paling unggul, paling berbudaya dan paling beradab, sehingga menimbulkan pandangan sinis terhadap etnis lain sebagai etnis yang tidak berbudaya dan beradab. Sebagai contoh keluarga keraton dengan status sosialnya yang tinggi, bergaul dengan kelompok kelas sosial yang sama. Pun demikian pula dengan masyarakat sosial kelas bawah, dimana mereka juga memiliki relasi sosial sendiri, bergaul dengan kelompoknya. Kelompok sosial kelas atas menguasai kelompok sosial kelas bawah, sehingga secara status sosial kelompok sosial kelas atas menghisap, mengeksploitasi, memaksa kelompok sosial kelas bawah untuk memberikan pelayanan terhadap kelompok kelas atas. Sementara itu etnis Tionghoa dan etnis Arab yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang melakukan relasi sosial dengan etnis lain sebatas pada kepentingan ekonomi. Masing-masing etnis itu menjalani hidup mereka sendiri dan mereka saling terpisah meskipun pemukimannya berdampingan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang bersifat Kasultanan tidak mengenal adanya demokrasi. Keberagaman ini kemudian yang menyebabkan terjadinya pergesekan yang berujung pada tindak kekerasan. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, agama, bahasa, dan cara pandang. Penduduk pribumi Yogyakarta pada umumnya bersikap sangat sopan, rendah hati, nrima, dan sabar, akan tetapi mereka juga dapat cepat naik darah jika perasaannya sudah tidak dapat ditahan karena tekanan dan penghinaan.

Pemukiman baru yang didirikan untuk membantu masyarakat dari luar daerah semakin bersifat majemuk, dihuni oleh berbagai etnis yang berbeda agama dan budaya. Di pemukiman tersebut kemudian terbentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada etnis dan agama seperti kelompok orang Bali, orang Medan, orang Kalimantan, orang Makasar, orang Papua, Paguyuban Katholik, Kelompok Pengajian, dan Kelompok Iqrok. Kemudian timbul pertanyaan besar yaitu bagaimana relasi sosial terjadi di antara mereka ?. Relasi sosial antar warga dapat berlangsung cukup baik meskipun tak jarang terjadi gesekan-gesekan kecil yang kadang kala berujung pada percecokan. Perbedaan agama kemudian yang menjadi faktor utama dari penyebab kelompok minoritas seringkali terpinggirkan dan tidak mendapat tempat dalam berbagai kegiatan bahkan kehadirannya dipandang sebelah mata di status sosial kehidupan masyarakat.

b. Primordialisme

Menurut Kun Maryati (2014:17), bahwa primordialisme adalah ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adat- istiadat, daerah kelahiran dan lain sebagainya, yang ada di dalam lingkungan pertamanya sehingga membentuk sikap tertentu.

Beberapa persoalan primordialisme kemudian muncul disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada rasnya, suku bangsanya, agamanya atau daerah kelahirannya
- 2) Sikap ingin mempertahankan keutuhan kelompok atau komunitas dari ancaman luar.
- 3) Adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi karena berkaitan dengan keyakinan, misalnya nilai keagamaan, falsafah hidup dan lain-lain.

Terkikisnya mental dan kuktur kolektif yang diiringi perubahan sosial menuju masyarakat industri tidak hanya terjadi di Yogyakarta, namun semua itu dapat diminimalisasikan asalkan ada kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya dari pihak pemerintahan. Sebuah contoh kecil mengenai lunturnya mental dan kultur kolektif yang menandakan ketidakpedulian sosial seseorang akan lebih asyik dengan *gadget* atau telepon genggamnya dari pada beramah-tamah dengan orang disekelilingnya. Demikian juga ketika ada tetangganya atau saudaranya mendapat musibah, dengan memberikan ucapan melalui *gadget*, hal tersebut dianggap sudah mewakili kehadiran dari orang tersebut, sebuah bentuk nyata bahwa keramahan masyarakat pun sudah berbeda dibandingkan satu dasawarsa lalu. Munculnya pemukiman pekerja yang tidak mengenal satu sama lain di lingkungan sekitarnya menandai adanya sebuah komunitas semu yang tidak di ikatkan oleh ikatan primordial, sehingga tidak memiliki kolektivitas kultural yang kuat. hal ini menurut Marx adalah sebuah konsekuensi logis yang harus diterima sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno dalam *Pemikiran Marx : dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (1999), bahwa kapitalisme dan industrialisasi selain menghadirkan konflik kelas juga menghadirkan keterasingan bagi masyarakatnya.

c. Etnosentris.

Etnosentrisme sikap suatu kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat dibandingkan kelompok masyarakat lain dan menganggap rendah keberadaan budaya lain tersebut. Sikap etnosentris dari beberapa masyarakat tersebut kemudian dijadikan nilai dan norma yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai kelompok masyarakat lain. Berdasarkan hal di atas, keragaman masyarakat berpotensi menimbulkan segmentasi kelompok, struktural yang terbagi-bagi, konsensus yang lemah, sering terjadi konflik, integrasi yang dipaksakan, dan adanya dominasi kelompok tentu saja akan berpotensi melemahkan gerak kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan keberagaman adalah modal berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural, namun kondisi tersebut juga berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik akibat dari kecemburuan sosial. Para peneliti mengungkapkan bahwa konflik terjadi akibat adanya dua fase pertentangan, diantaranya adalah Fase disharmoni yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan cara pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Kemudian Fase disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukannya cara pandangan tentang nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok.

Disharmonisasi atau konflik horizontal yang terjadi di Yogyakarta sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman, akan tetapi tidak adanya saling komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain ini menjadi pemicu konflik yang sering terjadi. Dibutuhkan adanya kesadaran untuk saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, serta sikap saling menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sikap warga untuk bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling

berkomunikas, sehingga setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan, umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia.

d. Prasangka dan Stereotip

Stereotip etnis berkaitan dengan ras, suku bangsa, kepercayaan, pekerjaan maupun kebangsaan. Pada hakikatnya stereotip merupakan imaginasi mentalitas yang kaku, yaitu dalam wujud pemberian penilaian negatif yang ditujukan kepada kelompok diluarnya, akan tetapi kepada sesama kelompoknya akan memberikan penilaian yang positif. Stereotip cara pandang terhadap masyarakat luar yang kaku dapat menyebabkan timbulnya prasangka (*prejudice*) yang kuat, yang menumbuhkan sikap stereotip dalam diri seseorang adalah sebagai akibat pengaruh suatu persepsi tertentu dan berfungsi untuk meyakinkan diri sendiri. Adanya berbagai perbedaan ras diantara segmen penduduk yang porsinya tidak sama dalam wilayah geografis atau sosial, akan dapat menimbulkan kesulitan. Stereotip etnis ini dapat menyebabkan seseorang bersifat konservatif dan tertutup terhadap hal-hal baru dan asing.

d. Kelompok Minoritas dan Mayoritas

Segmentasi tentang munculnya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari sikap stereotip, etnosentris, primordialisme yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Berbagai fenomena kegaduhan dan kekerasan (utamanya terhadap golongan minoritas) yang merebak di beberapa tempat di DIY, menjadi alarm akan adanya krisis multidimensi terhadap kemajemukan yang ada di Yogyakarta. Guna menghadapi berbagai gejolak dan realitas kekinian DIY, yang mengancam pada paradigma ke-Bhineka Tungga Ika-an, diperlukan terobosan pemikiran mengenai konsep pendidikan yang mampu memberdayakan manusia dan masyarakat dengan perbedaan yang dimiliki. Dengan bahasa lain, konsep pendidikan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan mendesak bangsa Indonesia dalam hal ini masyarakat Yogyakarta, untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai budaya yang terkandung mengenai keragaman etnis dan budaya tersebut. Dalam konteks ini, konsep pendidikan multikultural bisa menjadi alternatif mengingat pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas dari keberbedaan yang dimiliki. Paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Mengingat Yogyakarta merupakan kota pendidikan, maka perlu dikembangkan sistem pendidikan yang multikulturalisme agar perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta bukan lagi sebagai penghambat, tapi justru dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa.

## **2. Strategi berupa kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan nilai-nilai multikulturalisme dalam perspektif ketahanan wilayah di Yogyakarta ?**

Sebagai sebuah bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikultural, diperlukan strategi kebudayaan nasional dengan pendekatan nilai-nilai budaya yang tepat, di antaranya adalah prinsip mutualisme yaitu kebersamaan dan kerja sama yang memberi manfaat kepada semua pihak yang bekerja sama, bukan hanya searah dan menguntungkan satu pihak saja, berarti menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka. Dengan demikian membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya dengan didasari oleh sikap egalitarian, toleran dan demokratis. Beberapa strategi yang bisa

digunakan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan nilai-nilai multikulturalisme dalam perspektif ketahanan wilayah di Yogyakarta, diantaranya :

a. **Peran sekolah dalam Pendidikan Multikulturalisme.**

Sekolah merupakan suatu lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan serta merupakan tempat yang ampuh dalam membangun kecerdasan, sikap dan ketrampilan peserta didik dalam menghadapi realita kehidupannya. Untuk itu secara terus menerus perlu dibangun dan dikembangkan peran sekolah agar dapat menghasilkan generasi yang bertanggung jawab pada kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Peserta didik dalam mengadakan interaksi dengan seluruh warga sekolah yang memiliki latar belakang berbeda seperti: etnik, budaya, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, agama. Keragaman tersebut berimplikasi pada perlakuan dan kebijakan dari multikultural yang dihadapi sekolah kepada para peserta didik dan warga sekolah lainnya. Konsep multikulturalisme kadang-kadang agak membingungkan, karena merujuk sekaligus pada dua hal yang berbeda, yaitu realitas dan etika atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif atas interaksi di antara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif. Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relatif otonom itu, seperti etnisitas dan budaya yang semestinya dikelola dalam ruang-ruang publik. Dikatakan oleh Tilaar (2004: 84) bahwa, sisi multikultural mensyaratkan adanya kesadaran dari setiap individu ataupun kelompok, baik yang didasari atas kesamaan agama, etnis dan budaya untuk menghargai keberadaan individu atau kelompok yang lain. Ini merupakan kondisi ideal suatu masyarakat plural sebagaimana dinyatakan oleh para pemikir multikulturalisme gelombang pertama, yaitu: (1) kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*) dan (2) legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Maksudnya, multikulturalisme menjadi kondisi ideal suatu masyarakat, apabila keanekaragaman agama, etnis dan budaya tidak saja diakui, namun juga diberi kesempatan dan ruang untuk mengembangkan diri dan mengartikulasikan identitasnya dalam kerangka kesetaraan dan keadilan. Kerangka kesetaraan dan keadilan inilah yang menjadi perhatian penting para kritikus multikulturalisme gelombang kedua. Para pemikir ini memandang bahwa keaneka ragaman budaya di masyarakat bukanlah kenyataan yang diberikan (*given*) begitu saja, namun sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh sejumlah *other*. atas 556 suku bangsa dan 512 bahasa daerah. Dari segi agama, masyarakat Indonesia memiliki enam agama yang secara syah diakui yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

b. **Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural.**

Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek implementasi. Mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Pada perkembangan yang demikian itulah agama menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh.<sup>18</sup> Dalam

perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam, yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah menginternalisasi. Peter L. Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap kekacauan yang mengancam manusia. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang tidak diketahuinya.<sup>19</sup> Kondisi masyarakat yang multikultural juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. Pada masa kejayaan Islam seperti di Baghdad dan Kordoba, masyarakat di kota-kota tersebut adalah sangat plural. Dengan segala kemampuannya untuk mengakomodir kondisi sosial yang multikultural ini, Islam akhirnya tetap bisa eksis dan jaya. Sejarah mencatat bahwa sikap toleransi dan inklusivitas merupakan kunci dalam masyarakat multikultural. Sikap toleran telah ditunjukkan oleh para penguasa Muslim ketika mereka menaklukkan beberapa wilayah seperti Mesir, Syiria dan Persia. Ilmu pengetahuan yang sudah berkembang dengan pesat di wilayah-wilayah itu justru sepenuhnya didukung oleh Islam untuk terus dikembangkan. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas agama lain seperti Kristen, Yahudi dan bahkan Zoroaster juga diperbolehkan menjalankan agama masing-masing dengan bebas. Sikap inklusif atau terbuka juga bisa dilihat pada para sastrawan dan filsuf Muslim pada masa keemasan Islam. Selain menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber yang paling otoritatif, mereka juga menggunakan sumber-sumber dari kebudayaan lain. Sampai batas tertentu, respons agama terhadap kecenderungan multikulturalisme memang masih terkesan ambigu. Hal itu disebabkan, agama kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi dan mutlak. Bahkan, pada saat agama terlibat dengan urusan 'duniawi' sekalipun, hal ini tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan 'samawi.' Berbagai agama, tentu saja, berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspeknya, namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian itu. Karena sakral dan mutlak maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep bid'ah yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama. Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama; namun demikian basis teoritisnya tetap problematik. Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif. Padahal Tuhan dalam kitab-Nya jauh-jauh hari sudah menyeru tentang multikulturalisme. "Wahai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari diri yang satu, laki-laki dan perempuan dan Kami telah menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian dapat saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antaramu di mata Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mengetahui" (49:13). Perlu dicatat bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan bagi Muslim atau golongan secara eksklusif, tetapi ia diawali dengan seruan yang inklusif, "wahai manusia."

Inilah seruan yang mencakup semuanya. Seruan ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah satu keluarga besar, dengan moyang yang sama, meskipun mereka hidup dalam keluarga yang berbeda-beda. Ini adalah peringatan bahwa perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan adalah mungkin. Manusia layaknya seikat kembang, masing-masing bunga memancarkan keindahannya, sementara kombinasi dari semua bunga yang berwarnawarni itu akan memancarkan pemandangan yang lebih indah. Pernyataan dalam al-Qur'an yang meyakinkan tentang luasnya persaudaraan manusia ini adalah dasar yang sangat kokoh bagi kedamaian untuk semuanya.<sup>23</sup> Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. Pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama. Di sisi lain, kerancuan atau pemaknaan sepotong-potong atas doktrin keagamaan juga berdampak pada timbulnya sikap pengagungan terhadap kitab suci atau sering disebut skripturalisme. Menurut Ulil Abshar Abdalla, skripturalisme bisa disebut juga dengan "bibliolatry" atau secara terminologi berarti "pengagungan" kitab suci apa pun secara berlebihan sehingga menyerupai penyembahan.

c. **Peranan Media Dalam Membentuk Masyarakat Multikulturalisme.**

Tatang Muttaqin (2006:2) menjelaskan bahwa keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan realitas obyektif yang tidak dapat dipungkiri, sunatullah. Keanekaragaman masyarakat dan budaya Indonesia tercermin dengan adanya keragaman agama, etnik, bahasa dan budaya, muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu wilayah geografis, latar belakang historis, dan psikologis. Keanekaragaman ini di satu sisi akan memberi warna positif pada sistem nilai budaya bangsa apabila terwujud dalam bentuk interaksi yang saling melengkapi, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dipahami dengan baik, apalagi menjadikannya sebagai suatu kesatuan/unit dalam berkompetisi untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi dan politik. Dengan demikian, kemajemukan masyarakat Indonesia tidak mungkin dinegasikan. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika adalah representasi normatif yang menjadi acuan dalam mengelola kemajemukan sehingga kemajemukan tersebut menjadi kekuatan bangsa. Prinsip-prinsip kebhinnekaan di tengah-tengah masyarakat secara niscaya penting dikumandangkan untuk mewujudkan masyarakat yang mengerti akan kepastian dari perubahan di tingkat sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu konsep pembangunan. Perubahan sosial disarikan sebagai perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai sosial, sikap dan pola perilaku kelompok. Perubahan sosial terjadi karena adanya kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat didorong oleh empat faktor yaitu: 1) Urbanisasi, 2) Kemampuan membaca dan menulis, 3) Empati, kemampuan untuk melihat diri-sendiri di dalam situasi orang lain, 4) Partisipasi media dalam perubahan sosial. Keempat faktor ini sekaligus sebagai indikator modernitas masyarakat yang bersangkutan.

## V. SIMPULAN, SARAN

#### A. Simpulan

Multikulturalisme adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam konteks Indonesia. Keragaman ras, suku, bahasa dan agama merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Namun demikian, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Oleh karena itu, harus ada formula untuk mendamaikan dan menyatukannya. Dalam masyarakat modern, multikulturalisme lebih kompleks lagi. Sebab budaya baru terus bermunculan akibat akses komunikasi dan informasi yang tak terbendung. Saat terjadi pertemuan antara globalisasi negara-bangsa (*nation-state*) dan kelompok identitas maka kemunculan dari kelompok-kelompok identitas ini semakin menguat. Globalisasi akan mendorong penguatan kesadaran politik dalam kelompok-kelompok ini dan membuka kesadaran yang mendorong pentingnya identitas. Globalisasi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok identitas untuk menemukan akar identitasnya. Pemahaman agama, sebagai salah satu pilar penting dalam membentuk masyarakat adil dan sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan. Artinya, kerigidan, penuhanan atas pemahaman sendiri dan menganggap yang lain sebagai golongan sesat harus diberantas. Sebab pada hakikatnya tidak ada kebenaran apa pun yang menginjak dan meniadakan kebenaran lain.

Pendidikan multikulturalisme merupakan salah satu upaya dan strategi nasional memberikan pengertian, pemahaman dan sekaligus pengalaman kepada peserta didik tentang pentingnya makna semangat kebersamaan, saling menghormati, saling mengasihi, saling toleran dan saling pengertian antara satu dengan lainnya walaupun berbeda suku, etnis, ras, bahasa, budaya, agama dan status sosial. Pendidikan multikulturalisme merupakan bagian dari usaha komprehensif untuk menghindari, mencegah, dan menanggulangi konflik sosial yang bernuansa etnis, budaya, ras dan agama yang pernah terjadi di tanah air.

Multikulturalisme adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam konteks Indonesia. Keragaman ras, suku, bahasa dan agama merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Namun demikian, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Oleh karena itu, harus ada formula untuk mendamaikan dan menyatukannya. Dalam masyarakat modern, multikulturalisme lebih kompleks lagi. Sebab budaya baru terus bermunculan akibat akses komunikasi dan informasi yang tak terbendung. Saat terjadi pertemuan antara globalisasi negara-bangsa (*nation-state*) dan kelompok identitas maka kemunculan dari kelompok-kelompok identitas ini semakin menguat. Globalisasi akan mendorong penguatan kesadaran politik dalam kelompok-kelompok ini dan membuka kesadaran yang mendorong pentingnya identitas. Globalisasi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok identitas untuk menemukan akar identitasnya. Pemahaman agama, sebagai salah satu pilar penting dalam membentuk masyarakat adil dan sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan. Artinya, kerigidan, penuhanan atas pemahaman sendiri dan menganggap yang lain sebagai golongan sesat harus diberantas. Sebab pada hakikatnya tidak ada kebenaran apa pun yang menginjak dan meniadakan kebenaran lain.

Kehadiran media dalam kehidupan masyarakat secara niscaya memberikan arah baru pola pemikiran yang akan dilakukan oleh mereka. Media menjadi satu bahan tidak terpisahkan dengan eksistensi komunikasi dalam ruang lingkup kajian dakwah. Komunikasi menjadi alasan penting dalam pemenuhan bahasan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan ini pun bersinergi kuat dengan perkembangan media dalam mengakomodir semua dinamika pertumbuhan dalam dunia dakwah.

## B. Saran.

Saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini meliputi:

1. Setiap mahasiswa khususnya pada perguruan tinggi di Surakarta diharuskan mampu menguasai teori dan juga harus mampu mengimplementasikan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
2. Setiap mahasiswa harus mampu melakukan evaluasi diri agar dapat mengimplementasikan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
3. Pendidik atau dosen diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis multikultural, mengingat keberagaman mahasiswa semakin meningkat demi terwujudnya semboyan Bhineka Tunggal Ika.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisusilo, Sutarjo. 2013. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [2] Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [3] Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, (Yogyakarta: Institute Pluralism and Multikulturalism Studies (Impulse) dan Kanisius*.
- [4] Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992*, Jakarta : Rineka Cipta
- [5] Craig;, C, et. al. (2012). *sosiologi*. gamedia.
- [6] Choirul Mahfud. 2011. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- [7] Consuelo G. Sevilla dkk (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, UI Press.
- [8] Djemari Mardapi. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen dan Nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Offset.
- [9] Dr. Surwandono. (2013), *Konflik SARA Ancaman Konflik Tertinggi di Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- [10] Hadari Nawawi. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- [11] Harahap, Ahmad Rivai, 2004. "Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama".
- [12] Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011*, Jakarta : Rineka Cipta
- [13] Lucia Juningsih. (2015), *Multikulturalisme Di Yogyakarta Dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- [14] Mardiatmadja. 1986. *Hubungan Nilai dan Kebajikan*. Jakarta: Sinar Harapan
- [15] May, S. (1999). *Towards critical multiculturalism, Critical multiculturalism: rethinking multicultural and antiracist education*. Falmer Press.
- [16] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- [17] Muhammad Hendri Nuryadi, (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kota Surakarta)* Surakarta
- [18] Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [19] Nadilla Rahmanul Hakim. (2020), *Tantangan Negara Multikultur dan Solusinya*, Jakarta : Universitas Bina Nusantara.
- [20] Parsudi suparlan, dkk, 2002. *Antara Prasangka dan Realita : Telaah kritis wacana anti Cina di Indonesia*. Pustaka inspirasi
- [21] Sugiyono.(2017) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Steinberg, R. Shirley. (2009), *Perkembangan Multikulturalisme*, Jakarta: Bina Ilmu.
- [23] Sutopo, H.B. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Metologi untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [24] UUD 1945

[25] Wahana, Paulus. 2004. Nilai Etika Aksiologis Max Scheler. Yogyakarta: Kanisius.

#### **BIODATA PENULIS**



Penulis adalah Dosen tetap di Prodi Aeronautika Pertahanan di Akademi Angkatan Udara. Selama ini mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulis menyelesaikan Studi S1 dibidang Teknik Mesin di Universitas Widyagama Malang, kemudian melanjutkan program Studi Magister Ketahanan Nasional di Universitas Gadjahmada pada tahun 2008 dengan tesis berjudul Peran Depo Pemeliharaan Materiil dalam mendukung kesiapan Alutsista dan implementasinya pada Tugas TNI AU.